

RINGAKSAN

Hadirnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tentunya membawa angin segar dalam pembangunan pada tingkat desa. Hal ini dikarenakan adanya Dana Desa (DD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang besarnya paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Baik Alokasi Dana Desa dan Dana Desa diperuntukan melaksanakan pembangunan di desa dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Akan tetapi pada pelaksanaannya penggunaan alokasi dana desa ini masih menemui beberapa permasalahan. Menurut Sekertaris Desa Cikidang Bapak Purwono menjelaskan bahwa kualitas sumberdaya perangkat desa saat ini masih terbatas, perangkat desa masih belum mengerti sepenuhnya terkait proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Dalam pelaksanaan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang dibuat oleh Pemerintah Desa masih sering dikembalikan oleh Pemerintah Kecamatan untuk direvisi kembali, hal ini tentunya berakibat pada lamanya proses pembangunan di desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan teknik pemilihan informan *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah model analisis interaktif menurut Miles & Huberman dan keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas telah berhasil dijalankan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengadopsian pola interaksi yang diinginkan lewat alokasi dana desa oleh masyarakat desa cikidang. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah desa selalu mengundang perwakilan warga dalam kegiatan MusrembangDes, untuk membahas perencanaan kegiatan, slapanan untuk membahas permasalahan dalam kegiatan dan swadaya/swakelola masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa

SUMMARY

The presence of Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa would bring fresh wind in development at the village level. This is because the Dana Desa (DD) derived from the Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), and the Alokasi Dana Desa (ADD), which amount is at least 10% of equalization funds received by District/Municipal Budget Revenue and Expenditure after deducting Special Allocation fund. Both Alokasi Dana Desa and Dana Desa are intended to implement village development and community empowerment. But in practice the use of the village fund allocation is still encountering some problems. Secretary of Cikidang village Mr. Purnomo explained that the quality of the resource of the village is still limited, the village government still do not understand fully related to the process of disbursement of the Alokasi Dana Desa (ADD) ranging from making the Letter of Request for Payment (SPP) and the Letter of Responsibility (SPJ). In the implementation of disbursement of the Alokasi Dana Desa (ADD) Letter of Request for Payment (SPP) and the Letter of Responsibility (SPJ) made by the village government was often restored by the District Government to be revised again, it would result in a lengthy process of development in the village.

The purpose of this study is to investigate the implementation of the Alokasi Dana Desa in Village of Cikidang Cilongok District of Banyumas. The method used is quantitative method with purposive sampling technique for the informant election. The data collection was done by in-depth interviews, observation, and documentation. The analytical method used is an interactive model by Miles & Huberman and validity of virgin tested by triangulation.

The results showed that the implementation of the Alokasi Dana Desa in Village of Cikidang, Cilongok District of Banyumas has been successfully implemented. This is shown by the adoption of the desired pattern of interaction through the Alokasi Dana Desa Cikidang village by village communities. Improve community participation, the village government has always invited representatives of the residents in activities MusrembangDes, to discuss the planning of activities, slapanan to discuss problems in the activities and swadaya/swakelola communities in the implementation of activities.

Keywords: Policy Implementation, Alokasi Dana Desa.